



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA

JL. Kapas No. 10 Telp/Fax. (0274)-586563 Yogyakarta 55166
Web : www.pn-yogyakarta.go.id. Email : pn.yogyakarta@gmail.com

PENGUMUMAN

SELEKSI CALON PENYEDIA POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM)
PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2026
Nomor: 703/PPK.W13-U1/HM2.1/XII/2025

Berdasarkan amanat Pasal 23 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, dengan ini Pengadilan Negeri Yogyakarta membuka Pendaftaran Calon Penyedia Jasa Pos bantuan Hukum (POSBAKUM) Tahun Anggaran 2026, dengan ketentuan sebagai berikut:

A. Umum

Nama Paket Pekerjaan: Pengadaan Konsultan Jasa Pos Bantuan Hukum
Lingkup Pekerjaan : Pemberi Layanan Bantuan Hukum
Lokasi Pekerjaan : Pengadilan Negeri Yogyakarta
Alamat : Jalan Kapas No. 10 Kota Yogyakarta
Nilai Total HPS : Rp100.000.000 (seratus juta rupiah)
Sumber Dana : DIPA Pengadilan Negeri Yogyakarta Tahun 2026

B. Formasi Penerimaan

1. Penyedia Jasa pada Pos Bantuan Hukum berasal dari Lembaga Sipil penyedia Advokasi Hukum dan/atau unit kerja Advokasi Hukum pada organisasi profesi advokat dan/atau lembaga konsultansi dan bantuan hukum di Perguruan Tinggi.
2. Telah memiliki surat pengesahan pendirian badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM.
3. Bersedia memberikan jasa layanan bantuan hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta selama tahun anggaran 2026 dan sesuai jam kerja pada Pengadilan Negeri Yogyakarta.
4. Petugas pada Pos Bantuan Hukum adalah Advokat, S1 Hukum atau Sarjana Hukum Islam, yang menguasai Hukum dan Memiliki staf atau anggota yang memiliki gelar Sarjana Hukum atau Sarjana Hukum Islam.
5. Petugas pada Pos Bantuan Hukum ditunjuk oleh Pimpinan Lembaga Bantuan Hukum yang bersangkutan dan tidak boleh berganti sampai akhir masa kontrak.

C. Persyaratan

1. Mengajukan surat penawaran yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta UP. Pejabat Pengadaan Posbakum TA 2026 Pengadilan Negeri Yogyakarta yang dilengkapi dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
2. Penyedia telah terdaftar dalam APLIKASI SIKAP (Sistem Informasi Kinerja Penyedia) dan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).
3. Berbentuk Badan Hukum dengan melampirkan Akta Notaris dan terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM atau izin pendirian dari Rektor bagi Perguruan Tinggi.
4. Telah terakreditasi oleh kemenkumham RI (Sk Menteri Hukum dan HAM sebagai pemberi bantuan hukum periode 2025-2027).
5. Memiliki kemampuan menyediakan fasilitas/peralatan/perlengkapan untuk melaksanakan pekerjaan Jasa Konsultansi ini, yaitu: Komputer, Printer dan Alat Tulis Kantor.

6. Memiliki Kantor/Cabang/Perwakilan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta. (dibuktikan dengan Surat Keterangan Domisili setempat sesuai Kabupaten/Kota Pengadilan Negeri) atau memiliki Surat Keputusan Kantor Cabang (bagi yang tidak berdomisili di wilayah Kabupaten/ Kota Pengadilan Negeri Yogyakarta)
7. Melampirkan Fotocopy KTP Pimpinan dan yang akan ditunjuk sebagai petugas Posbakum.
8. Menyediakan minimal 2 orang petugas bantuan hukum di setiap ruang sidang.
9. Melampirkan NPWP dan Nomor Rekening atas nama Lembaga.
10. Melampirkan Bukti Setor Pajak Tahunan (SPT) Tahun terakhir (SPT tahun 2024)
11. Membuat surat pernyataan bersedia menandatangani Pakta Integritas (form terlampir dalam SDP)
12. Bersedia mengikuti Tes Kompetensi
13. Membuat surat pernyataan Surat Pernyataan Peserta yang berisi: Peserta bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah; Tidak sedang menjalani sanksi pidana; Tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan; Badan usaha yang diwakili tidak sedang dikenakan sanksi Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan (form terlampir dalam SDP)
14. Bersedia menandatangani pernyataan tidak mengajukan keberatan atas hasil seleksi.
15. Bersedia tunduk pada aturan dan ketentuan Pengadaan Jasa Posbakum di Pengadilan Negeri Yogyakarta.
16. Memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia jasa konsultansi sejenis dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak dibuktikan dengan melampirkan Dokumen Kontrak/SPK/MOU.
17. Pengadaan Jasa ini menggunakan mekanisme **Pengadaan Langsung** (tidak berdasarkan Harga Penawaran Terendah).

D. Pendaftaran, Waktu dan Tempat

1. Pemasukan Calon Peserta secara offline: Rabu s/d Senin tanggal 17 s/d 22 Desember pukul 09.00 s/d 15.00
2. Undangang dan Pemasukan Dokumen penawaran : Selasa s/d Senin tanggal 23 s/d 29 Desember pukul 09.00 s/d 15.00
(untuk tanggal 29 Desember 2025 sampai pukul 10.00)
3. Berkas Penawaran dan Lampirannya ditujukan kepada : Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta
UP. Pejabat Pengadaan Posbakum TA 2026
Pengadilan Negeri Yogyakarta

E. Proses Pengadaan

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. Pembukaan Dokumen Penawaran | : Senin, 29 Desember 2025 (pukul 10.00) |
| 2. Evaluasi Dokumen Penawaran | : Senin s/d selasa tanggal 29 s/d 30 Desember 2025 |
| 3. Tes Kualifikasi/Kompetensi | : Rabu, 31 Desember 2025 |

F. Penetapan Penyedia Jasa dan Penandatanganan SPK

- | | |
|---|------------------------|
| 1. Pengumuman Pemenang Penyedia Jasa | : Jumat 2 Januari 2026 |
| 2. Penetapan Penyedia dan Penandatangan SPK | : Jumat 2 Januari 2026 |

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk dapat diketahui.



Pejabat Pembuat Komitmen
Pengadilan Negeri Yogyakarta

Yenny Viky Effendy, ST, S.H., M.Eng.

Yogyakarta, 17 Desember 2025
Pejabat Pengadaan Jasa Posbakum
Pengadilan Negeri Yogyakarta

Susi Susanti Sinaga, A.Md,